



KEMENTERIAN  
KELAUTAN DAN  
PERIKANAN

# LAPORAN KINERJA

## Direktorat Perbenihan

TRIWULAN II

2024



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA  
DIREKTORAT PERBENIHAN

2024

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Perbenihan Triwulan 2 Tahun 2024 ini, yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja yang dilakukan oleh Direktorat Perbenihan selama kurun waktu dari bulan April sampai dengan Juni Tahun 2024 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktur Perbenihan tahun 2024.

LKj Direktorat Perbenihan Triwulan 2 Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan, sehingga dapat menjadikan bahan evaluasi serta dapat memberikan umpan balik untuk pencapaian kinerja triwulan berikutnya pada tahun 2024 atau dapat dijadikan pemicu untuk peningkatan kinerja organisasi serta bahan evaluasi melalui langkah-langkah perbaikan pelayanan yang lebih profesional dan transparan bagi masyarakat.

Demikian laporan ini disajikan semoga dapat bermanfaat dan berguna bagi kemajuan pembangunan kelautan dan perikanan di masa mendatang.

Jakarta, 18 Juli 2024

Direktur Perbenihan



Ditandatangani  
Secara Elektronik

Nono Hartanto

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	vii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
BAB 2 .....	7
PERENCANAAN KINERJA .....	7
BAB 3 .....	15
AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
3.2.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan .....	16
3.2.1.1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan .....	16
3.2.2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan .....	17
3.2.2.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat .....	17
3.2.2.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat .....	19
3.2.2.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat .....	21
3.2.2.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi .....	23
3.2.2.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat .....	25
3.2.2.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat .....	27
3.2.2.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun .....	28
3.2.2.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi .....	31
3.2.3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha .....	34
3.2.3.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun .....	34
3.2.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan .....	36
3.2.4.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB .....	36
3.2.5. 3.2.5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan .....	37

3.2.5.1. SK.4 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Direktorat Perbenihan .....	37
3.2.5.1.1. IKSK.04.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan .....	37
3.2.5.1.2. IKSK.04.2 Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan .....	39
3.2.5.1.3. IKSK.04.3 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan .....	39
3.2.5.1.4. IKSK.04.4 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Perbenihan .....	40
3.2.5.1.5. IKSK.04.5 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan .....	41
3.2.5.1.6. IKSK.04.6. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA .....	42
3.2.5.1.8. IKSK.04.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan	44
3.2.5.1.9. IKSK.04.9 Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan ..	45
BAB 4 .....	47
PENUTUP .....	47
4.1. KESIMPULAN .....	47
4.2. REKOMENDASI .....	47

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2024 .....	vii
Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2024 .....	2
Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2024 Direktorat Perbenihan .....	15
Tabel 3.2.1. Capaian Tenaga kerja yang terlibat di bidang perbenihan triwulan 2 2024 .....	16
Tabel 3.2.2. Capaian indikator kinerja bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat .....	18
Tabel 3.2.3. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk. ....	20
Tabel 3.2.4. Capaian IKU Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat .....	21
Tabel 3.2.5. Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat .....	22
Tabel 3.2.6. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan II Tahun 2024 .....	23
Tabel 3.2.7. Capaian IKU Produksi calon induk di UPT .....	25
Tabel 3.2.8. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat tahun 2024 .....	26
Tabel 3.2.9. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT .....	28
Tabel 3.2.10. Persentase Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun .....	30
Tabel 3.2.11. Capaian indikator kinerja progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi .....	31
Tabel 3.2.12. Capaian Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun .....	35
Tabel 3.2.13. Capaian IKU Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB .....	37
Tabel 3.2.14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan TW 2 tahun 2024 .....	38
Tabel 3.2.15. Capaian Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024 .....	39
Tabel 3.2.16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024 .....	40

Tabel 3.2.17. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar TW 2 Tahun 2024 .....	41
Tabel 3.2.18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024 .....	42
Tabel 3.2.19. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA TW 2 Tahun 2024 .....	43
Tabel 3.2.20. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024 .....	44
Tabel 3.2.21. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024 .....	44
Tabel 3.2.22. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan TW 2 tahun 2024 .....	45

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya .....	5
Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024 .....	7
Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024 .....	8
Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2024 .....	12
Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Trwulan 2 Tahun 2024 .....	14

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Perbenihan triwulan 2 Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dalam aplikasi Kinerjaku pada triwulan 2 Direktorat Perbenihan mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,92 % dengan jumlah indikator kinerja sebanyak 20 indikator kinerja dengan rincian seperti terlihat dalam Tabel 1.

Tabel 1. Indikator Kinerja Organisasi Direktorat Perbenihan Tahun 2024

Kode	Sasaran/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Target	Capaian
			Thn 2024	TW2	TW 2
<b>SK.01</b>	<b>Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan</b>				
IKSK.01.1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (orang)	orang	11.504	0	0
<b>SK.02</b>	<b>Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan</b>				
IKSK.02.1	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	25	52,5
IKSK.02.2	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	25	61,52
IKSK.02.3	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	0	49,58
IKSK.02.4	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	ekor	1.000.000	0	0
IKSK.02.5	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	25	88,6
IKSK.02.6	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	persen	75	25	59,26
IKSK.02.7	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	lokasi	2	0	0
IKSK.02.9	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	persen	60	0	0
<b>SK.03</b>	<b>Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha</b>				
IKSK.03.1	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun (persen)	persen	70	0	0
<b>SK.04</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan</b>				
IKSK.04.1	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB (persen)	persen	50	0	0
<b>SK.05</b>	<b>Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Perbenihan</b>				
IKSK.05.1	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	85	80	89,75
IKSK.05.2	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan (nilai)	nilai	82	0	0

	IKSK.05.3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	80	80	100
	IKSK.05.4	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	94	94	133,33
	IKSK.05.5	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	persen	80	0	0
	IKSK.05.6	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	persen	91	25	47,05
	IKSK.05.7	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (nilai)	persen	75	0	0
	IKSK.05.8	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (persen)	nilai	80	80	100
	IKSK.05.9	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (persen)	persen	90	40	7,52

Capaian indikator pada triwulan 2 tahun 2024 seperti terlihat tabel 1 menunjukkan bahwa kinerja perbenihan sangat baik karena beberapa indikator kinerja utama untuk melebihi dari target 100%, kecuali 1 (satu) indikator yang tidak mencapai target yaitu penyerapan anggaran.

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan perikanan budidaya tahun 2020-2024 perlu memiliki perencanaan yang berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan amanat PP No. 17 Tahun 2017, perencanaan dan penganggaran nasional harus dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial berdasarkan prinsip *money follows program*. Berdasar pada isu dan permasalahan yang masih dihadapi, Ditjen Perikanan Budidaya perlu me-reformulasi kebijakan pembangunan 5 tahun ke depan dengan memfokuskan pada pengelolaan sumber daya perikanan budidaya yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial, bukan lagi semata pada peningkatan produksi saja.

Dengan ditetapkannya arah kebijakan dan strategi pembangunan perikanan budidaya, maka sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya berdasarkan tujuan yang akan dicapai telah dijabarkan dalam 4 (empat) perspektif dengan masing-masing Indikator Kinerja sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya untuk mengatasi tantangan global dan permasalahan yang menuntut perubahan paradigma dan desain percepatan pembangunan perikanan budidaya.

Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB RI No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa setiap kementerian berkewajiban menyusun Laporan Kinerja (LKj) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dibuat sebelumnya. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.

Terkait dengan kebijakan tersebut Direktorat Perbenihan, berupaya untuk mendukung kebijakan tersebut melalui pemenuhan target dan sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Tahun 2024 yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Tahunan Direktorat Perbenihan Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (orang)	11.504
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dan Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		5.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (ekor)	1.000.000
		6.	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		7.	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (persen)	75
		8.	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (lokasi)	2
		9.	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	10.
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	11.	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB (persen)	50
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat Perbenihan	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	85
		13.	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan (nilai)	82

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	14. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	80
	15. Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	94
	16. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (persen)	80
	17. Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (persen)	91
	18. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (nilai)	75
	19. Indeks Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (persen)	80
	20. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (persen)	98

## 1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) triwulan 2 tahun 2024 Direktorat Perbenihan ini adalah sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Perbenihan dan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pencapaian target IKU di triwulan berikutnya agar pencapaian target tahunan dapat terpenuhi secara sempurna.

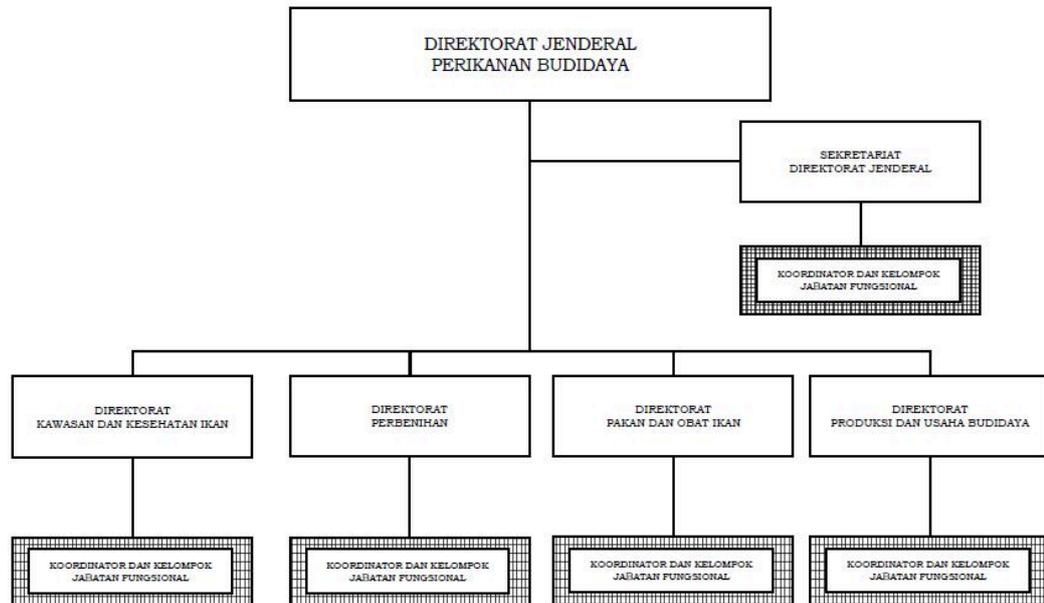
## 1.3. Tugas dan Fungsi

Direktorat Perbenihan berdasarkan Permen No.48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kelautan Dan Perikanan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang induk, perbenihan ikan air tawar, perbenihan ikan air payau dan perbenihan ikan laut.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Direktorat Perbenihan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baik, serta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul,
- e. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan, peredaran dan pemantauan induk, mutu benih ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan laut, pertimbangan teknis pemasukan ikan hidup, penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia dan evaluasi penerapan Standar Nasional Indonesia perbenihan, penerapan cara pembenihan ikan yang baikserta rekomendasi pasca pelepasan induk unggul; dan
- f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan susuna organisasi Direktorat Perbenihan terdiri atas kelompok jabatan fungsional.

## STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya

### 1.4. Permasalahan Utama

Secara umum permasalahan/ kendala yang dihadapi dalam Kinerja Direktorat Perbenihan terutama dalam upaya peningkatan produksi perikanan budidaya adalah isu jaminan keamanan pangan produk yang menjadi tuntutan, baik pasar luar negeri maupun dalam negeri, sehingga pentingnya jaminan bagi unit pembenihan untuk menghasilkan benih yang sehat dan bermutu melalui sertifikasi CPIB.

### 1.5. Sistematika Laporan Kinerja (LKj)

Laporan Kinerja (LKJ) ini secara umum memuat target dan capaian kinerja Direktorat Perbenihan pada triwulan 2 Tahun 2024. Sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Direktorat Perbenihan, LKj ini menginformasikan perbandingan antara target dan capaian kinerja (*performance results*) triwulan 2 Tahun 2024 dengan target kinerja pada triwulan tahun sebelumnya. Dari analisa tersebut akan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sehingga dapat diperoleh masukan bagi perbaikan kinerja di triwulan berikutnya.

Adapun sistematika penyajian laporan adalah sebagai berikut:

1. **Ikhtisar Eksekutif**, bagian ini menyajikan gambaran menyeluruh secara ringkas tentang capaian kinerja Direktorat Perbenihan pada triwulan 2 tahun 2024.
2. **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan hal-hal umum tentang Ditjen Perikanan Budi Daya serta uraian singkat tentang tugas pokok dan fungsi Direktorat Perbenihan termasuk latar belakang, maksud dan tujuan penulisan LKJ.
3. **Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, pada bab ini disajikan rencana strategis, gambaran singkat mengenai sasaran dan kebijakan dan program Ditjen Perikanan Budi Daya pada tahun 2020 - 2024, rencana kerja dan anggaran tahun 2022 serta penetapan kinerja Direktorat Perbenihan.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, pada bab ini disajikan prestasi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Direktorat Perbenihan serta evaluasi dan analisis kinerja tahun 2024. Dalam bab ini juga disampaikan akuntabilitas keuangan yang mencakup alokasi dan realisasi anggaran termasuk pula penjelasan tentang kinerja anggaran.
5. **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan, kegagalan serta permasalahan dan kendala utama. Dalam bab ini juga disampaikan saran pemecahan masalah yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.
6. **Lampiran**, pada bab ini berisi data dukung yang diperlukan dalam penjelasan/ pembahasan dari Bab I sampai dengan Bab III.

## BAB 2

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budidaya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 2.1. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi, meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan

Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024

## 2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Direktorat Perbenihan sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Direktorat Perbenihan tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kampung Budidaya berbasis kearifan lokal;
- b. Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan;
- c. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budidaya bidang perbenihan; dan
- d. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Satker Direktorat Perbenihan.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, Direktorat Perbenihan telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

- a. Penetapan sasaran kegiatan (SK) dan indikator kinerja (IKK) Direktorat Perbenihan Tahun 2024 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Direktorat Perbenihan selama 1 (satu) triwulan, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja;
- b. Penetapan Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2024; dan

c. Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi setiap triwulannya.

### 2.3. Penetapan Kinerja

Sebagai penjabaran dari Rencana Kinerja, maka disusun Perjanjian Kinerja yang memuat mengenai Perjanjian Kinerja antara Direktorat Perbenihan dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2024 seperti terlihat dalam gambar 2.3.



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DIREKTORAT PERBENIHAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Nono Hartanto**  
Jabatan : Direktur Perbenihan  
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**  
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya  
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Direktur Perbenihan

Nono Hartanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DIREKTORAT PERBENIHAN**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan	1.	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan (Orang)	11.504
2.	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan	2.	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		3.	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		4.	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		5.	Calon Induk Unggul yang Diproduksi (Ekor)	1.000.000
		6.	Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		7.	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat (Persen)	75
		8.	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun (Lokasi)	2
		9.	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi (Persen)	60
		3.	Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha	10.
4.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan	11.	Persentase Unit Usaha yang Mendapatkan Pembinaan CPIB Dibandingkan dengan yang Mendapatkan Sertifikat CPIB (Persen)	50
5.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Direktorat	12.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	85

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
Perbenihan	13.	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan (Nilai)	82
	14.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	80
	15.	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	94
	16.	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan (Persen)	80
	17.	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA (Persen)	91
	18.	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (Nilai)	75
	19.	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan (Persen)	80
	20.	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan (Persen)	98

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

**TB. Haeru Rahayu**

Pihak Pertama  
Direktur Perbenihan

**Nonio Hartanto**

**DATA ANGGARAN :**

NO	KEGIATAN /SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pelayanan Publik Kepada Lembaga	800.000.000
2.	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	1.200.000.000
3.	Bantuan Peralatan / Sarana	33.200.000.000
4.	Bantuan Hewan	4.579.994.000
<b>Total Anggaran Direktorat Perbenihan Tahun 2024</b>		<b>39.779.994.000</b>

Jakarta, Januari 2024

Pihak Kedua  
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama  
Direktur Perbenihan



Nono Hartanto

Gambar 2.3. Perjanjian Kinerja Direktorat Perbenihan Tahun 2024

#### **2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024**

Pengukuran capaian kinerja Direktorat Perbenihan dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Direktorat Perbenihan dengan data pencapaian kerjanya. Metode pengukuran kinerja berpedoman pada manual indikator kinerja dan cara pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh Tim Kinerja, sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat yakni dari unit kerja pemilik kegiatan.

Pengukuran capaian indikator kinerja Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024, menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik (triwulanan/semesteran/ tahunan);
2. Pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas;
3. Pencapaian kinerja atasan merupakan akumulasi pencapaian kinerja bawahannya;
4. Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja merupakan data yang telah diverifikasi oleh Tim Pengelola Kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat; dan juga diukur melalui aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id”;
5. Status capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada dalam aplikasi “kinerjaku.kkp.go.id” ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).

Pengukuran kinerja berbasis *Balanced Scorecard* dilakukan dengan cara penghitungan capaian terhadap target dengan menggunakan polarisasi *Maximize*, *Minimize*, dan *Stabilize*.

1. *Maximize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *maximize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin tinggi (dari nilai 100%) semakin baik.

2. *Minimize*

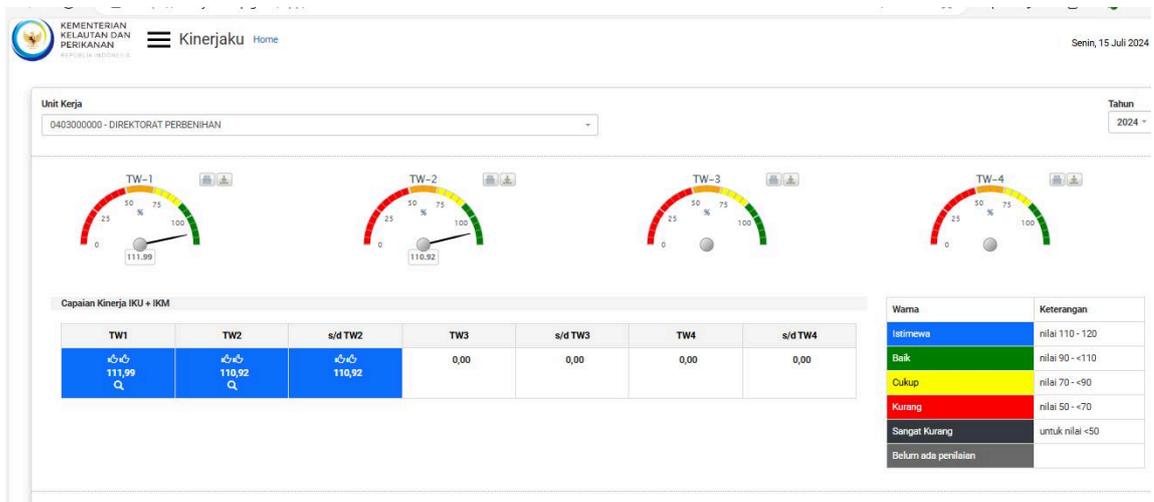
IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *minimize* yaitu IKU yang mempunyai kriteria pencapaian semakin rendah (dari nilai 100%) semakin baik.

3. *Stabilize*

IKU yang diukur dengan menggunakan polarisasi *stabilize* yaitu IKU yang semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Hasil pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja Triwulanan yang didukung dengan penerapan Aplikasi “Kinerjaku”, capaian NKO Direktorat Perbenihan triwulan 2 tahun 2024 sebesar 110,92 seperti terlihat dalam gambar 2.4.

Gambar 2.4. Nilai Capaian Kinerja Trwulan 2 Tahun 2024



## BAB 3

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas capaian organisasi Direktorat Perbenihan, yang menjadi indikator utama sebanyak 11 Indikator dan 9 indikator kegiatan dengan rincian seperti disajikan dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2024 Direktorat Perbenihan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	TW 2	
				TARGET	CAPAIAN
1	Tenaga Kerja yang Terlibat di Bidang Perbenihan	orang	11.504	0	0
2	Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat	persen	75	25	52,5
3	Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	25	62,52
4	Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	25	49,58
5	Calon Induk Unggul yang Diproduksi	ekor	1.000.000	0	0
6	Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	25	88,6
7	Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat	persen	75	25	59,25
8	Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun	lokasi	2	0	0
9	Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi	persen	60	0	0
10	Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun	persen	70	0	0
11	Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB	persen	50	0	0
12	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	85	80	89,75
13	Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan	nilai	82	0	0
14	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	80	80	100
15	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	94	94	133,33
16	Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas / Strategis Lingkup Direktorat Perbenihan	persen	80	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET Tahunan 2024	TW 2	
				TARGET	CAPAIAN
17	Jumlah Pelaku Usaha KP yang Terintegrasi KUSUKA	persen	91	25	47,05
18	Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan (nilai)	persen	75	0	0
19	Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan	persen	80	80	100
20	Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan	peren	90	40	7.92

### 3.2. Analisis Kinerja

#### 3.2.1. Ekonomi Sektor Perikanan Budi Daya Meningkatkan Bidang Perbenihan

##### 3.2.1.1. Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan

Indikator kinerja ini merupakan jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam Kegiatan Pengelolaan Perbenihan Ikan pada Direktorat Perbenihan tahun 2024, baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan program prioritas dan bantuan pemerintah.

Tenaga kerja yang terlibat dalam program prioritas terdiri dari kegiatan bantuan benih, bantuan calon induk, bantuan bibit rumput laut, bantuan Kebun Bibit Rumput Laut (KBRL), bantuan sarana dan prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) / Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT), dan modeling rumput laut berbasis kawasan yang dilaksanakan oleh Direktorat Perbenihan dan UPT DJPB.

Tabel 3.2.1. Capaian Tenaga kerja yang terlibat di bidang perbenihan triwulan 2 2024

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan							
Iku		Tenaga kerja yang terlibat di bidang Perbenihan							
2023		2024			% Capaian			Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024	% pertumbuhan thn 2023-2024	Target 2025	% Capaian thd target akhir Renstra
-	22.720	11.504	-	7.210	-	62,67	-	-	-

Capaian yang terlibat dalam kegiatan bantuan pemerintah di bidang Perbenihan, hasil identifikasi dan perhitungan data yang ada terlihat dalam tabel

3.2.1 realisasi jumlah tenaga yang terserap sebesar 7.210 orang atau tercapai 62,67 % dari target 11.504 orang.

Besarnya capaian jumlah tenaga kerja yang terserap terdiri dari tenaga yang terlibat dalam kegiatan bantuan benih dengan jumlah 5.630 orang, bantuan calon induk 750 orang, bantuan bibit rumput laut 100 orang, bantuan kebun bibit rumput laut sebanyak 310 orang, bantuan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR) / Hatchery Skala Rumah Tangga (HSRT) sebanyak 276 orang dan bantuan Modeling Rumput Laut Berbasis Kawasan sebanyak 144 orang.

### **3.2.2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidaya Ikan**

#### **3.2.2.1. Persentase Bantuan Sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke Masyarakat**

Kebijakan strategis pembangunan perikanan budi daya yang mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan khususnya untuk peningkatan produksi ikan air tawar, payau, dan laut perlu penyediaan unit pembenihan ikan di daerah pengembangan perikanan budi daya. Pada tahun anggaran 2024, bantuan sarpras UPR dan HSRT yang disalurkan ke masyarakat diberikan di beberapa lokasi Kampung Perikanan Budidaya untuk turut serta dalam mendukung Program Terobosan yang bergerak pada sektor perikanan budidaya.

Tujuan pelaksanaan bantuan adalah untuk meningkatkan produksi benih ikan bermutu di masyarakat karena ketersediaan benih ikan yang dimaksud tidak dapat hanya bergantung pada pemerintah atau perusahaan skala besar. Oleh karena itu, pemenuhan benih ikan bermutu juga membutuhkan peran serta masyarakat agar ketersediaan benih di berbagai daerah dapat terpenuhi.

Bantuan sarpras UPR/ HSRT TA 2024 dilakukan oleh 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perikanan Budi Daya (BBPBAT Sukabumi, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, dan BPBAP Takalar) sebanyak 30 paket di 29 Kabupaten/ Kota dengan wilayah lokasi penyaluran yaitu Sukabumi, Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya, Temanggung, Wonosobo, Grobogan, Demak, Merangin, Sungai Penuh, Kuantan Singingi, Kota Pariaman, Kota Lubuk Linggau, Musirawas, Lampung Utara, HS Selatan, HS Tengah, Malinau, Kapuas, Pulang Pisau, Kutai Kertanegara, Sinjai, Gowa, Bulukumba, Minahasa Utara, Pinrang, Enrekang, Maros, dan Soppeng.

Jenis bantuan berupa sarana sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya Nomor 441 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat dan Hatchery Tahun Anggaran 2024. Bantuan sarana unit pembenihan yang diberikan dengan menu yang dapat dipilih sesuai dengan kondisi lapangan atau kebutuhan kelompok penerima bantuan, antara lain: (a) Bentuk Induk dan pakan (induk ikan, pakan induk, pakan benih, dan/ atau larva/ telur); dan (b) Peralatan pendukung (peralatan perikanan, peralatan uji kualitas air, aerasi, wadah pemeliharaan, instalasi air, peralatan resirkulasi, sarana biosecurity, instalasi penetasan telur, obat ikan dan vitamin, instalasi penetasan telur). Komoditas ikan yang diberikan disesuaikan dengan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya.

Tabel 3.2.2. Capaian indikator kinerja bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024			
73,80%	100%	75%	25%	52,50%	210%	70%	-	-	-

Pelaksanaan bantuan sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke masyarakat dilakukan berpedoman pada Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Sarana Unit Pembenihan Rakyat dan Hatchery Skala Rumah Tangga TA 2024 (Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya No.41 Tahun 2023). Capaian pada periode triwulan II, yaitu: (i) 21 unit sudah selesai BAST (Sukabumi, Bandung, Purwakarta, Tasikmalaya, Temanggung, Wonosobo, Grobogan, Demak, HS Selatan, HS Tengah, Kapuas, Pulang Pisau, Kutai Kertanegara, Sinjai, Gowa, Bulukumba, Minahasa Utara, Pinrang, Enrekang, Maros, dan Soppeng) ; (ii) 1 unit proses kontrak (Malinau); dan (iii) 8 unit akan proses BAST pada bulan Juli 2024 (Merangin, Sungai Penuh, Kuantan Singingi, Kota Pariaman, Kota Lubuk Linggau, Musirawas (2 unit), dan Lampung Utara).

Perhitungan realisasi bantuan sarpras UPR/HSRT yang disalurkan ke masyarakat adalah perbandingan antara jumlah bantuan sarana yang disalurkan

dengan jumlah bantuan sarana yang diusulkan dari proposal yang terverifikasi. Jumlah proposal yang diverifikasi sebanyak 40 proposal dengan rincian sebagai berikut: (1) BBPBAT Sukabumi: 8 proposal; (2) BPBAT Sei Gelam: 14 proposal; (3) BPBAT Mandiangin: 6 proposal; (4) BPBAT Tatelu: 4 proposal; dan (5) BPBAP Takalar: 8 proposal.

Pagu anggaran kegiatan bantuan sarpras UPR/ HSRT yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 1.500.000.000,- dengan realisasi pada periode triwulan II sebesar Rp1.073.562.010,- atau 71,57%.

Rekomendasi atas rencana aksi atas hasil capaian triwulan II tahun 2024, yaitu: (1) Agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan; (2) Proses pendistribusian bantuan sesuai dengan hasil identifikasi dan verifikasi CPCL dan SK penerima bantuan; (3) Agar segera ditindaklanjuti dengan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ); dan (4) Agar segera dilakukan pemeriksaan dan pembuatan BA pemeriksaan dan BAST.

Rencana tindak lanjut triwulan III tahun 2024, antara lain: (1) Agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Sarana Unit Pembenihan; dan (2) Agar segera dilakukan pemeriksaan dan pembuatan BA pemeriksaan dan BAST

### **3.2.2.2. Persentase Bantuan Calon Induk yang Disalurkan ke Masyarakat**

Dalam usaha budidaya ikan secara intensif dibutuhkan benih dan induk yang memiliki kualitas baik. Induk yang unggul akan dapat menghasilkan benih ikan yang bermutu pula. Sedangkan dengan melakukan pemeliharaan benih yang bermutu maka proses produksi akan menjadi efektif dan efisien. Program bantuan calon induk merupakan salah satu program prioritas yang ditujukan untuk peremajaan induk-induk yang ada di masyarakat, dimana sasaran bantuan calon induk ini adalah unit-unit pembenihan milik masyarakat maupun balai benih milik pemerintah provinsi atau kabupaten.

Kegiatan bantuan calon induk dilaksanakan oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Direktorat Perbenihan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang memiliki tugas dan fungsi memproduksi calon induk ikan air tawar, payau, dan laut. Target bantuan calon induk yang telah ditetapkan pada tahun 2024 adalah

60.914 ekor dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 2.500.000.000,-. Jenis calon induk ikan yang dibantukan antara lain ikan nila, lele, mas, patin, papuyu, nilem, gabus haruan, udang vanname, bandeng, kakap putih, dan bawal bintang. Adapun rincian target pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis yang mendapatkan penugasan yaitu:

Tabel 3.2.3. Unit Pelaksana Teknis DJPB yang melaksanakan bantuan calon induk.

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	Direktorat Perbenihan	25.169
2	BBPBAT Sukabumi	7.742
3	BPBAT Sungai Gelam Jambi	6.856
4	BPBAT Mandiangin	6.284
5	BPBAT Tatelu	5.713
6	BPBAP Ujung Batee	805
7	BPBAP Takalar	3.218
8	BPIUUK Karangasem	4.983
9	BBPBL Lampung	32
10	BPBL Ambon	20
11	BPBL Lombok	20
12	BPBL Batam	72
Jumlah Target		60.914

Indikator Kinerja Bantuan Calon Induk ini diukur secara semesteran dengan target 75%, dimana dalam penghitungannya adalah membandingkan antara jumlah calon induk yang direalisasikan dengan hasil verifikasi. Beberapa UPT telah merealisasikan bantuan calon induk pada triwulan II tahun 2024 sebanyak 37.475 ekor atau 61,52% dari target. UPT yang telah merealisasikan bantuan calon induk diantaranya yaitu BBPBAT Sukabumi sebanyak 17.930 ekor, BPBAT Sungai Gelam 4.310 ekor, BPBAT Mandiangin 4.000 ekor, BPBAT Tatelu 2.800 ekor, BPBAP

Takalar 3.400 ekor, BBPBL Lampung 35 ekor, dan BPIUUK Karangasem 5.000 ekor. Bantuan calon induk tersebut telah terdistribusi kepada 71 pokdakan yang tersebar di 13 provinsi dan 39 kabupaten/kota

Tabel 3.2.4. Capaian IKU Calon induk yang didistribusikan berdasarkan usulan masyarakat.

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan							
IKU		Persentase calon induk yang disalurkan ke masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	Thd realisasi TW II 2024	Thd target tahun 2024	TW II 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
71,46%	203,43%	75%	30%	61,52%	105,07%	82,03%	86,09%	-	-

Dalam rangka pencapaian target bantuan calon induk pada periode berikut, maka disiapkan rencana aksi untuk mempercepat proses pelaksanaan program bantuan calon induk ke masyarakat, diharapkan setiap UPT lingkup DJPB dapat menindaklanjuti adanya usulan yang telah masuk dan melakukan identifikasi dan verifikasi kepada calon penerima bantuan serta segera mendistribusikannya setelah ada penetapan.

Pagu anggaran yang tersedia pada kegiatan bantuan calon induk yang disalurkan ke masyarakat pada tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 233.743.500,- atau 9,35%.

### 3.2.2.3. Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat

Dalam rangka mendukung kebijakan strategis pembangunan perikanan budidaya yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan produksi perikanan budidaya, perlu dilakukan penyediaan benih ikan, diantaranya melalui program bantuan benih ikan.

Program bantuan benih ikan merupakan salah satu kegiatan prioritas andalan Ditjen Perikanan Budi Daya. Benih ikan merupakan faktor penting dalam

kegiatan pembudidayaan ikan, karena pembudidaya ikan kecil masih sangat memerlukan bantuan ikan benih bermutu yang dihasilkan dari induk ikan unggul. Tujuan bantuan benih ikan adalah untuk menstimulus kegiatan budidaya ikan, meningkatkan produktivitas pembudidaya ikan, dan untuk menambah stok sumber daya ikan pada suatu perairan umum.

Pelaksanaan bantuan benih berpedoman pada Keputusan Dirjen Perikanan Budi Daya Nomor 381 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Benih Ikan Tahun Anggaran 2024. Pemberi bantuan benih ikan adalah Direktorat Perbenihan dan Satker UPT lingkup Ditjen Perikanan Budidaya, yaitu BBPBAT Sukabumi, BBPBL Lampung, BPBAT Sungai Gelam Jambi, BPBAT Mandiangin, BPBAT Tatelu, BPBAP Ujung Batee, BPBAP Takalar, BPBL Ambon, BPBL Lombok, BPBL Batam, BPIUUK Karangasem, dan/atau Satker lingkup DJPB yang ditunjuk oleh Dirjen Perikanan Budi Daya.

Tabel 3.2.5. Capaian indikator kinerja persentase bantuan benih ikan yang disalurkan ke masyarakat

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Persentase Bantuan Benih Ikan yang Disalurkan ke Masyarakat							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024			
69,98%	114,06%	75%	25%	49,58%	198,32%	66,11%	-	-	-

Bantuan benih bermutu ikan air tawar, payau, laut, udang, dan kepiting yang didistribusikan ke masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu para pembudidaya skala kecil dan mikro untuk meningkatkan hasil produksi, serta untuk *restocking* ikan lokal di perairan umum dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya genetik dan pemanfaatan produktivitas perairan umum, sehingga berdampak baik pada kesejahteraan Masyarakat.

Pada periode triwulan II, benih yang telah terdistribusi sebanyak 43.079.885 atau 49,58% ekor dari target 86.889.630 ekor. Realisasi bantuan benih yang disalurkan ke masyarakat periode triwulan II tahun anggaran 2024 tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.2.6. Realisasi Bantuan Benih dan Restocking Triwulan II Tahun 2024

No	UPT DJPB	Benih yang Terdistribusi (Ekor)					Benih yang Terdistribusi (Ekor)
		Tawar	Payau	Laut	Udang	Kepiting	
1	DIREKTORAT PERBENIHAN	63.620	-	-	-	-	63.620
2	BBPBAT SUKABUMI	8.080.255	-	-	150.000	-	8.230.255
3	BPBAT SEI GELAM	2.040.000	-	-	-	-	2.040.000
4	BPBAT MANDIANGIN	2.190.000	-	-	-	-	2.190.000
5	BPBAT TATELU	1.689.500	-	-	-	-	1.689.500
6	BPBAP UJUNG BATEE	-	42.000	107.850	7.290.960	-	7.440.810
7	BPBAP TAKALAR	-	892.000	35.000	9.050.000	100.000	10.077.000
8	BBPBL LAMPUNG	-	-	290.500	-	-	290.500
9	BPBL AMBON	-	-	457.900	-	-	457.900
10	BPBL BATAM	-	-	339.500	-	-	339.500
11	BPBL LOMBOK	-	-	212.800	-	-	212.800
12	BPIU2K KARANGASEM	-	-	148.000	9.900.000	-	10.048.000
	<b>Jumlah</b>	<b>14.063.375</b>	<b>934.000</b>	<b>1.591.550</b>	<b>26.390.960</b>	<b>100.000</b>	<b>43.079.885</b>

Pagu anggaran bantuan benih ikan sebesar Rp. 27.482.890.000,- Realisasi keuangan periode triwulan II tahun 2024 yang disalurkan ke masyarakat sebesar Rp. 5.530.445.050,-

Dalam pencapaian IKU, permasalahan yang dihadapi adalah pengajuan proposal tersendat. Rencana tindak lanjut triwulan III tahun 2024, yaitu: (1) Agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Benih Ikan; (2) Proses pendistribusian bantuan sesuai dengan hasil identifikasi dan verifikasi CPCL dan SK penerima bantuan; (3) Agar segera ditindaklanjuti dengan proses pengadaan barang dan jasa (PBJ); dan (4) Agar segera dilakukan pemeriksaan dan pembuatan BA pemeriksaan dan BAST. Satker DJPB yang melakukan penyaluran agar tetap konsisten terhadap target yang telah ditetapkan agar pencapaian penyaluran bantuan benih ikan dapat berjalan dengan lancar, serta melakukan monitoring serta pelaporan secara rutin terkait bantuan benih ikan air tawar, payau, laut, udang, dan kepiting.

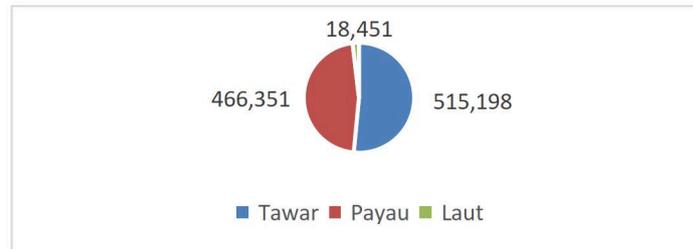
#### 3.2.2.4. Calon Induk Unggul yang Diproduksi

Penyediaan induk unggul menjadi salah satu tugas pokok bagi unit pelaksana teknis di bawah DJPB. Melalui produksi ini, diharapkan akan memastikan ketersediaan benih bermutu. Pada tahun anggaran 2024, sebanyak 1.000.000 ekor calon induk menjadi target produksi bagi UPT lingkup

DJPB dengan alokasi anggaran yang disediakan sebanyak Rp. 40.000.000.000,-. Sedangkan rincian target per UPT tercantum dalam tabel berikut.

No	Unit Pelaksana Teknis	Target (ekor)
1	BBPBAT Sukabumi	167.638
2	BPBAT Sungai Gelam Jambi	119.901
3	BPBAT Mandiangin	113.690
4	BPBAT Tatelu	80.343
5	BBPBAP Jepara	97.421
6	BPBAP Ujung Batee	54.991
7	BPBAP Situbondo	80.981
8	BPBAP Takalar	79.979
9	BLUPPB Karawang	74.724
10	BPIUUK Karangasem	114.413
11	BBPBL Lampung	4.305
12	BPBL Ambon	4.090
13	BPBL Lombok	3.476
14	BPBL Batam	4.048
	Jumlah Target	1.000.000

Komoditas yang diproduksi sebagai calon induk, terdiri atas beberapa spesies. Pada komoditas ikan air tawar seperti ikan mas, nila, lele, patin, gurami, serta ikan-ikan lokal lainnya. Komoditas ikan air payau, diantaranya adalah udang vanname, udang windu, bandeng, dan kepiting. Sedangkan untuk komoditas ikan laut antara lain kerapu, kakap putih, bawal bintang, bubara dan kobia. Berdasarkan jenis komoditasnya, target produksi calon induk dapat terlihat dalam diagram berikut.



Pada diagram diatas, target produksi calon induk ikan air tawar sebesar 515.198 ekor (51,5%), calon induk air payau 466.351 ekor (46,6%) dan calon induk laut 18.451 ekor (1,8%).

Kegiatan produksi calon induk di UPT lingkup DJPB pada periode triwulan II tahun 2024 telah mampu menghasilkan produksi calon induk sebanyak 391.335 ekor atau 39,13% dari target. Adapun rinciannya adalah produksi calon induk ikan air tawa 236.794 ekor, calon induk ikan air payau 148.464 ekor, dan calon induk ikan laut 6.077 ekor.

Tabel 3.2.7. Capaian IKU Produksi calon induk di UPT

Sasaran Kegiatan		Terkelolanya perikanan budidaya berkelanjutan							
IKU		Calon induk unggul yang diproduksi							
2023		2024			% Capaian		% perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	Thd realisasi TW II 2024	Thd target tahun 2024	TW II 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
372.259	1.039.745	1.000.000	-	391.335	-	39,13%	105,12%	1.000.000	39,13%

Dalam rangka pencapaian target produksi calon induk pada periode berikutnya, direncanakan bahwa pada setiap UPT untuk tetap melakukan proses pemeliharaan dan secara rutin menyeleksi calon-calon induk.

Pagu anggaran untuk kegiatan pada IKU calon induk unggul yang diproduksi adalah sebesar Rp. 40.000.000.000,- dan sampai dengan triwulan II telah terealisasi sebesar Rp. 21.828.799.033,- atau 54,57%.

### 3.2.2.5. Persentase Bantuan Bibit rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat

Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi budidaya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang

berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudi dayakan yaitu *Eucheuma cottonii*.

Permasalahan dalam pengembangan industri rumput laut adalah keterbatasan bibit rumput laut yang berkualitas, tahan penyakit, cepat tumbuh dan selalu tersedia sepanjang musim. DJPB melalui unit pelaksana teknisnya telah mengembangkan bibit rumput laut kultur jaringan yang memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih baik serta laju pertumbuhan yang relatif cepat. Produksi bibit rumput laut kultur jaringan dilaksanakan di laboratorium kultur jaringan rumput laut di 6 (enam) UPT DJPB yaitu BBPBL Lampung, BBPBAP Jepara, BPBAP Situbondo, BPBAP Takalar, BPBL Lombok, dan BPBL Ambon. Diharapkan melalui produksi bibit rumput laut kultur jaringan yang telah diproduksi dari UPT akan dapat menyediakan bibit rumput laut yang berkualitas bagi pembudidaya rumput laut.

Persentase bantuan bibit rumput laut diukur berdasarkan jumlah bibit yang disalurkan berbanding dengan jumlah usulan bibit rumput laut yang terverifikasi.

Capaian Persentase bantuan bibit rumput laut yang disalurkan ke Masyarakat pada Triwulan 2 tahun 2024 yakni 88,60% atau sebanyak 17.100 Kg dari 19.300 Kg usulan yang terverifikasi pada sebagaimana Tabel 1. Kelompok penerima bantuan bibit rumput laut berlokasi di Provinsi Sulawesi Tenggara, Jawa Tengah, Banten, Jawa Timur, Bali, dan sentra perikanan budidaya lainnya.

Tabel 3.2.8. Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat tahun 2024

Sasaran Strategis		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudi daya Ikan Persentase Bantuan Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat							
Indikator Kinerja		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target (Kg)		Realisasi (Kg)				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024			
-	-	26.300	25	17.100	88,60	65,02	-	-	-

Realisasi anggaran Bantuan bibit rumput laut dari UPT-DJPB pada Triwulan 2 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pagu anggaran bantuan bibit rumput laut sebesar Rp. 917.567.000,-
2. Realisasi anggaran hingga TW 2 2024 sebesar Rp. 694.140.182,- atau sebesar 75,65%.

Hasil evaluasi atas rencana aksi atas capaian TW 2 tahun 2024 yakni Pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Bibit rumput laut, telah dilaksanakan identifikasi dan verifikasi oleh UPT, dan Jumlah bibit rumput laut yang tersalurkan sebanyak 17,1 ton untuk 11 kelompok yang terverifikasi.

Rekomendasi atas rencana aksi TW 2 tahun 2024 yakni agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Bibit rumput laut, Agar UPT mempercepat proses pengadaan terhadap usulan yang telah diverifikasi.

#### **3.2.2.6. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat**

Rumput laut menjadi salah satu komoditas unggulan yang telah ditetapkan KKP. Produksi budidaya rumput laut tahun 2022 sebesar 9,23 juta ton yang berkontribusi sebanyak 62,07% dari total produksi perikanan budidaya pada tahun 2022. Sedangkan potensi lahan budidaya rumput laut di Indonesia adalah 175.967 ha. Jenis rumput laut yang dibudidayakan yaitu cottonii dan sargasum.

Salah satu permasalahan dalam budidaya rumput laut keterbatasan bibit dan sarana pemeliharannya. Kualitas bibit rumput laut akan mempengaruhi hasil produksi akhirnya. Masyarakat pembudidaya rumput laut saat ini kesulitan dalam memperoleh bibit rumput laut, serta sarana pemeliharaan bibit yang standar. Oleh karena itu, DJPB menyediakan program bantuan kebun bibit rumput laut bagi para pembudidaya rumput laut untuk dapat membantu menyiapkan dan menyediakan bibit di sentra budidaya rumput laut di wilayahnya.

Penghitungan indikator kinerja ini adalah dengan membandingkan antara jumlah kebun bibit rumput laut yang disalurkan kepada pembudidaya dengan jumlah usulan kebun bibit rumput yang telah diverifikasi. Penerima bantuan ini adalah kelompok pembudidaya rumput laut yang telah terdaftar di dinas dan memenuhi ketentuan dalam juknis bantuan.

Capaian bantuan kebun bibit rumput laut TW 2 tahun 2024 sebanyak 48 unit atau 59,26% dari 81 unit usulan yang terverifikasi sebagaimana terlihat dari Tabel 2. Kelompok penerima bantuan kebun bibit rumput laut berlokasi di Provinsi Maluku Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Tabel 3.2.9. Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT

Sasaran Strategis		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudi daya Ikan Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat							
Indikator Kinerja		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target (Unit)		Realisasi (Unit)				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024			
-	-	90	25	48	59,26	53,33	-	-	-

Realisasi anggaran Bantuan kebun bibit rumput laut dari UPT-DJPB pada Triwulan 2 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pagu anggaran bantuan bibit rumput laut sebesar Rp. 4.059.000.000,-
2. Realisasi anggaran hingga TW 2 2024 sebesar Rp. 1.841.695.790,- atau sebesar 45,37%.

Hasil evaluasi atas rencana aksi atas capaian TW 2 tahun 2024 yakni Pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan KBRL, telah melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi calon lokasi dan calon penerima, Jumlah kebun bibit rumput laut yang tersalurkan sebanyak 48 unit untuk 41 kelompok yang terverifikasi.

Rekomendasi atas rencana aksi TW 2 tahun 2024 yakni agar pelaksanaan bantuan sesuai dengan pedoman Juknis Bantuan Kebun Bibit rumput laut, dan Agar UPT mempercepat proses verifikasi terhadap usulan proposal yang diajukan.

### 3.2.2.7. Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun

Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode tahun 2021-2024 mencanangkan 5 Program Terobosan. Dalam implementasi program terobosan tersebut, Ditjen Perikanan Budidaya fokus pada 2 program yaitu: 1) pengembangan perikanan budidaya berorientasi ekspor dengan komoditas unggulan, antara lain:

udang, lobster, kepiting, dan rumput laut; dan 2) pembangunan Kampung Perikanan Budidaya berbasis kearifan lokal untuk pengentasan kemiskinan sekaligus menjaga kepunahan.

Rumput laut merupakan salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan mengingat permintaan pasar yang tinggi serta metode budidaya yang sederhana. Permintaan rumput laut yang besar dikarenakan perannya yang sangat penting dalam berbagai produk yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, baik melalui pengolahan sederhana yang langsung dapat dikonsumsi, maupun melalui pengolahan yang lebih kompleks, seperti produk farmasi, kosmetik, dan pangan, serta produk lainnya.

Pada tahun 2020, Indonesia adalah negara produsen rumput laut terbesar kedua di dunia dengan volume 9,6 juta ton setelah China (20,8 juta ton) sementara urutan ketiga dan keempat adalah Korea Selatan (1,7 juta ton) dan Filipina (1,4 juta ton) (FAO, 2022). Produksi ini masih bisa ditingkatkan karena Indonesia memiliki potensi area budidaya laut yang cukup besar yaitu  $\pm 12$  juta ha, serta iklim tropis yang mendukung untuk budidaya rumput laut. Dengan demikian tingkat pemanfaatan lahan budidaya Rumput laut baru masih rendah. Untuk mewujudkan peningkatan produksi rumput laut diperlukan pendekatan untuk menyediakan budidaya berbasis kawasan yang dibangun bagi masyarakat, yang bertujuan agar system logistic bibit rumput laut dapat lebih efektif dan efisien, terintegrasi dan komprehensif dapat memenuhi kebutuhan rumput laut pada suatu wilayah regional. Pengembangan kawasan budidaya rumput laut di tahun 2024 akan dilakukan di Propinsi Maluku dan Nusa Tenggara Timur mengingat kedua Propinsi tersebut merupakan salah satu penghasil rumput laut terbesar di Indonesia.

Berdasarkan Permen KP No. 111 Tahun 2023 tentang Kampung Perikanan Budidaya, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kabupaten Rote Ndao telah ditetapkan sebagai salah satu Kampung Perikanan Budidaya Rumput Laut. Kabupaten Maluku Tenggara merupakan salah satu produsen rumput laut terbesar di Provinsi Maluku setelah Kota Tual. Namun demikian dari potensi yang ada, pemanfaatannya baru 781,6 ha (sekitar 11%) di Kei Kecil dan 64,7 ha (sekitar 8%) di Kei Besar. Sementara itu Kabupaten Rote Ndao yang terletak di Nusa Tenggara Timur memiliki potensi budidaya rumput laut seluas 32.000 Ha dan baru termanfaatkan sebanyak 2.124 Ha. Pengukuran capaian atas indikator ini adalah dengan melihat

progres pelaksanaan kegiatan di 2 lokasi modeling budidaya rumput laut berbasis kawasan ini.

Capaian pembangunan modeling budi daya rumput laut TW 2 tahun 2024 di 2 lokasi tercapai 10% progres kegiatan yang terlaksana sebagaimana terlihat dari Tabel 3. Pembangunan modeling budi daya rumput laut berbasis kawasan akan dibangun di Kab. Rote Ndao, Prov. Nusa Tenggara Timur dan Kab. Maluku Tenggara, Prov. Maluku.

Tabel 3.2.10. Persentase Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan yang Dibangun

Sasaran Strategis		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudi daya Ikan Persentase Bantuan Kebun Bibit Rumput Laut di UPT yang Disalurkan ke Masyarakat							
Indikator Kinerja		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target (Lokasi)		Realisasi (Lokasi)	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2					
-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

Realisasi anggaran Modeling Budi Daya Rumput Laut Berbasis Kawasan di Direktorat Perbenihan pada Triwulan 1 tahun 2024 sebagai berikut:

1. Pagu anggaran sebesar Rp. 33.100.000.000,-
2. Realisasi anggaran hingga TW 2 2024 sebesar Rp. 581.046.760,- atau sebesar 1,76%.

Hasil evaluasi atas rencana aksi atas capaian TW 2 tahun 2024 yakni telah dilaksanakan penyusunan Feasibility Study, Master plan, dan DED UPBRL di Kab. Rote Ndao dan Kab. Maluku Tenggara, kegiatan yang sedang progres (Outstanding kontrak) yakni bantuan sarana modeling budi daya rumput laut (KBRL, BRL, Kebun Starter, dan Buoy Penanda), bantuan peralatan UPBRL, bantuan meubelair, bantuan rumah apung, bantuan starter lab, dan bantuan perahu ketinting di Kab. Rote Ndao dan Maluku Tenggara. Kegiatan penunjang seperti video 3D dan bantuan kendaraan roda tiga telah dilaksanakan.

Rekomendasi atas rencana aksi TW 2 tahun 2024 yakni agar pelaksanaan pembangunan dapat dipercepat berdasarkan time schedule yang telah disusun,

dan agar dapat memperhatikan tiap progres berdasarkan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.

### 3.2.2.8. Persentase Progres Operasional Pusat Produksi Benih dan Induk Pada 3 Lokasi

Pusat produksi benih dan induk berada di 3 (tiga) lokasi, yaitu Kab Mesuji (Prov. Lampung), Kab Musirawas (Prov. Sumatera Selatan), dan Kab Dharmasraya (Prov. Sumatera Barat).

#### a) Kab Mesuji

Pada tahun 2024, BBPBAT Sukabumi mendapatkan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pembangunan dan operasional Pusat Produksi Benih dan Induk yang terletak di Desa Buko Poso, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung.

#### b) Kab Musirawas dan Kab Dharmasraya

Pada tahun 2024, BPBAT Sungai Gelam-Jambi mendapatkan alokasi anggaran untuk pembangunan lahan *Broodstock Center* (BC) yang terletak di Desa Babat, Kecamatan STL Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan. Serta *Broodstock Center* (BC) di Nagari Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2.11. Capaian indikator kinerja progres operasional pusat produksi benih dan induk pada 3 lokasi

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pembudidayaan Ikan							
IKU		Terbangunnya prasarana dan sarana pusat produksi benih dan induk							
2023		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2022-2023	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi				Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 4 2024	Thd target tahun 2024			
-	55%	60%	-	0	0	0	-	-	-

#### a. Analisa

##### i. Kab Mesuji

Progres operasional pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji periode triwulan II, yaitu:

- Memiliki sarana produksi, namun belum melakukan pemeliharaan

- Pekerjaan yang telah dilakukan pada triwulan II, antara lain: (i) Review gambar dan DED; (ii) Survei ke lapangan; (iii) Koordinasi dengan konsultan perencana teknis; dan (iv) Pembangunan fisik berupa Pematangan lahan seluas 44.000 m<sup>2</sup>.

Pagu anggaran Pusat Produksi Benih dan Induk di Kab Mesuji tahun 2024 sebesar Rp.15.000.000.000,- dengan realisasi anggaran periode triwulan II sebesar Rp. 1.757.116.700,-.

Rencana tindak lanjut tahun 2024 untuk pusat produksi benih dan induk di Kab Mesuji, yaitu pembangunan fisik berupa: (1) Ruang Root Blower; (2) Bangunan Rumah Genset/Panel Listrik; (3) Pekerjaan Kolam Bulat Diameter 2 (48 Unit); (4) Pekerjaan Kolam Bulat Diameter 4 (32 Unit); (5). Pekerjaan Kolam Bulat Diameter 6 (24 unit); (6) Jalan Area Blok F dan G; (7) Pagar Keliling; dan (8) Turap/talud, drainase/saluran dan Jembatan.

ii. Kab Dharmasraya

Progres operasional BC di Kab Dharmasraya periode triwulan II, yaitu:

- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva) namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, dan sudah melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi berupa kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih, fasilitas pemeliharaan induk/ benih dan sudah mampu memproduksi benih
- Pada periode triwulan II telah dilaksanakan, antara lain: (i) Review gambar; (ii) Koordinasi dengan konsultan perencana; dan (iii) Progres pembangunan fisik sebesar 5,22% untuk pekerjaan pembuatan tandon air.

Pagu anggaran pembangunan BC di Kab Dharmasraya sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pada triwulan II tahun 2024, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 403.407.923,-.

Rencana tindak lanjut tahun 2024, yaitu pembangunan fisik berupa: (1) Pembangunan beton; (2) Rehab pintu air; (3) Pembuatan tandon air; (4) Pembangunan tower air; (5) Rehab Pematang Kolam; dan (6) Pembuatan saluran inlet outlet.

### iii. Kab Musirawas

Progres operasional Broodstock Center di Kab Musirawas periode triwulan II, yaitu:

- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva) namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, namun belum melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi minimal (kolam induk, unit pemeliharaan larva, dan unit pendederan benih), dan sudah terdapat minimal 1 fasilitas pemeliharaan induk/ benih, dan sudah melakukan pemeliharaan induk/ benih
- Memiliki sarana produksi berupa kolam induk, unit pemeliharaan larva, unit pendederan benih, fasilitas pemeliharaan induk/ benih dan sudah mampu memproduksi benih
- Pada periode triwulan II telah dilaksanakan, antara lain: (i) Review gambar; (ii) Koordinasi dengan konsultan perencanaan; (iii) Progres pembangunan fisik sebesar 0,364%, yaitu untuk pembangunan rumah jaga, kantor Administrasi dan jalan beton.

Pagu anggaran pembangunan BC di Kab Musirawas sebesar Rp. 2.000.000.000,-. Pada triwulan II tahun 2024, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp. 256.944.618,-.

Rencana tindak lanjut tahun 2024, yaitu pembangunan fisik berupa: (1) Rumah jaga; (2) Kantor Administrasi; dan (3) Jalan beton.

### **3.2.3. Meningkatnya Akses Permodalan dan Jaminan Usaha**

#### **3.2.3.1. Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun**

Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang selanjutnya disebut NSPK adalah petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga NSPK bidang perbenihan merupakan suatu petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan kegiatan bidang perbenihan ikan.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Standar merupakan acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan. Standar adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan kegiatan bidang perbenihan ikan. Sedangkan kriteria merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kegiatan perbenihan ikan. Sesuai dengan Rencana Strategis DJPB tahun 2020 – 2024 telah ditargetkan sebanyak 64 NSPK bidang perbenihan yang diterbitkan. Namun hingga tahun 2023, baru tercatat sebanyak 45 NSPK atau 70,31%. Beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya keseluruhan NSPK sesuai Renstra antara lain adanya kebijakan *automatic adjustment* yang menyebabkan beberapa forum terkait penyusunan NSPK bidang perbenihan tidak dapat dilaksanakan.

NSPK bidang perbenihan menjadi penting, karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan ikan. Beberapa penyusunan NSPK bidang perbenihan yang direncanakan pada tahun 2024 antara lain petunjuk teknis bantuan pemerintah lingkup kegiatan pengelolaan perbenihan ikan, penyusunan Rancangan SNI bidang perbenihan, dan hasil rumusan forum perbenihan ikan nasional.

Indikator kinerja ini mengukur jumlah rekomendasi kebijakan berupa penerbitan NSPK atau kebijakan-kebijakan lain terkait bidang perbenihan ikan pada tahun 2024 dibandingkan terhadap target rekomendasi kebijakan bidang perbenihan tahun 2020 – 2024.

Tabel 3.2.12. Capaian Persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun

Sasaran Kegiatan Iku 2023		Meningkatnya Akses Pemodal dan Jaminan Usaha							
		persentase NSPK Bidang Perbenihan yang Disusun							
Realisasi		2024			% Capaian		% pertumbuhan thn 2023-2024	Rancangan Renstra DJPB 2020-2024	
		Target (%)		Realisasi	Thd realisasi TW 1 2024	Thd target tahun 2024		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 1	TW 2					
-	-	70	49	71,875	179	106	-	-	-

Indikator kinerja ini diukur secara tahunan, sehingga belum dapat dilakukan analisa terhadap capaiannya. Adapun NSPK bidang perbenihan yang disusun antara lain rumusan Kegiatan Forum Jejaring Perbenihan Nasional, Penilaian Jenis Ikan Baru yang akan dibudidayakan, dan RSNI 3 Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan.

Terkait progres kegiatan pada triwulan II ini, rumusan kegiatan forum jejaring perbenihan nasional telah diselenggarakan pada Hari Kamis s.d. Sabtu tanggal 2-4 Mei 2024 di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta. Adapun hasil Forum Jejaring Perbenihan Nasional tahun 2024 antara lain :

- a. Dalam rangka mendukung program revitalisasi tambak Pantura Jawa seluas 78.550 hektar, diperlukan dukungan penyediaan 700 ribu ekor induk dan 4,7 miliar benih.
- b. Diperlukan penyusunan *roadmap* dalam rangka penyediaan produksi induk unggul dan benih bermutu nila salin.
- c. Diperlukan benih yang memenuhi standar hasil produksi (Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Nasional Indonesia (SNI)) oleh para produsen benih, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pembudi daya nila salin di tambak, baik dari aspek kualitas dan kuantitas.
- d. Memperbanyak induk unggul baru melalui pemuliaan dan mendorong induk hasil pemuliaan untuk diajukan pelepasan (release) sesuai prosedur ketentuan peraturan yang berlaku.
- e. Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap induk dan benih nila pasca pelepasan (release) yang bertujuan untuk memastikan performance, ketersediaan, dan distribusi.

- f. BRIN dan Perguruan Tinggi bersinergi dengan rencana program revitalisasi tambak Pantura Jawa untuk pengembangan teknologi pembenihan dan pembesaran untuk kegiatan budi daya nila salin.
- g. Pemerintah Daerah mendorong unit pembenihan di wilayahnya untuk menjadi anggota jejaring perbenihan, khususnya komoditas nila, serta menerapkan prinsip-prinsip Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB).
- h. Komitmen peserta forum yang hadir, yaitu : Meningkatkan produksi benih nila untuk mendukung budi daya nila salin di Pantura Jawa; Meningkatkan sinergitas antara produsen induk, benih, dan pembudi daya nila; Menjadikan Forum Jejaring Perbenihan sebagai ajang komunikasi bagi para produsen induk dan benih nila.

Kegiatan Penilaian Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan telah membentuk Tim Penilai Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan yang ditertera dalam Pengesahan KEPMEN KP NOMOR 44 TAHUN 2024 tanggal 11 Juni 2024. Selain itu rencana pelaksanaan kegiatan Rapat Penilaian Jenis Ikan Baru Yang Akan Dibudidayakan awal Agustus 2024.

Progres Kegiatan RSNi 3 Perikanan Budidaya Bidang Perbenihan antara lain Penetapan RSNi2 sebanyak 6 judul pada tanggal 19 – 21 Juni 2024 yaitu Induk Udang Penaeid, Benih Udang Penaeid, Produksi benih, Udang Penaeid, Benih Bening Lobster, Induk Ikan Kuwe, dan Benih Ikan Kuwe.

#### **3.2.4. Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Pengawasan Perikanan Budi Daya Bidang Perbenihan**

##### **3.2.4.1. Persentase Unit Usaha yang mendapatkan Pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB**

Pada tahun 2024, DJPB menargetkan sebanyak 150 unit pembenihan mendapatkan pembinaan dalam rangka persiapan menuju sertifikasi CPIB, dengan target pada IKU adalah 50% unit pembenihan yang mendapatkan pembinaan dapat tersertifikasi. Sampai dengan periode triwulan II tahun 2024 telah dilakukan pembinaan terhadap 77 unit pembenihan, dengan rincian sebanyak 23 unit pembenihan ikan berlokasi di provinsi Jawa Tengah, 46 unit pembenihan di Jawa Timur, 2 unit pembenihan di Kalimantan Timur dan 6 unit pembenihan ikan berlokasi di provinsi Sulawesi Utara.

Tabel 3.2.13. Capaian IKU Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB

Sasaran Kegiatan		Meningkatnya kualitas pengendalian dan pengawasan perikanan budidaya bidang perbenihan							
IKU		Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB							
2023		2024			% Capaian		% perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
Realisasi		Target		Realisasi					
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	Thd realisasi TW II 2024	Thd target tahun 2024	TW II 2024	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	-	50%	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa realisasi IKU Persentase unit usaha yang mendapatkan pembinaan CPIB dibandingkan dengan yang mendapatkan sertifikat CPIB belum terealisasi. Hal ini disebabkan karena adanya peralihan wewenang lembaga yang dapat melakukan penilaian kesesuaian untuk sertifikasi. Mengacu pada Peraturan Presiden nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, disebutkan bahwa pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan menjadi tugas dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BP2MHKP).

Anggaran yang tersedia pada kegiatan pembinaan unit pembenihan ikan adalah sebesar Rp. 800.000.000,- dan hingga triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 289.994.790,- .

### **3.2.5. 3.2.5. Tatakelola Pemerintahan yang Baik pada Direktorat Perbenihan**

#### **3.2.5.1. SK.4 Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik pada Direktorat Perbenihan**

##### **3.2.5.1.1. IKSK.04.1 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan**

Indikator kinerja ini adalah adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas ASN yang hasilnya digunakan untuk penilaian dan evaluasi guna pengembangan profesionalitas profesi ASN. Indeks profesionalitas ASN diukur menggunakan standar profesionalitas ASN. Standar profesional ASN terdiri dari :

- a. Kualifikasi, merupakan dimensi yang menggambarkan tingkat atau jenjang pendidikan yang dicapai seseorang untuk memperoleh suatu pengetahuan dan/atau keahlian khusus, sehingga seseorang tersebut mengetahui, memahami dan dapat menjalankan pekerjaan tertentu sesuai tugas jabatannya. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenjang riwayat pendidikan terakhir yang dicapai oleh PNS. Bobot dimensi ini sebesar 25%, dengan besaran sub-bobot : (i) S-3 sebesar 25%; (ii) S-2 sebesar 20%; (iii) S-1/D-IV sebesar 15%; (iv) D-III sebesar 10%; (v) SLTA/D-I/D- II/ sederajat sebesar 5%; dan dibawah SLTA sebesar 1%.
- b. Kompetensi, merupakan dimensi yang menggambarkan kemampuan seseorang yang merupakan kombinasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap serta didukung dengan program pengembangan kompetensi berkesinambungan yang tercermin melalui perilaku kinerja, yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi. Alat ukur yang digunakan adalah persentase berdasarkan jenis diklat yang pernah diikuti (seperti Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat Teknis, Kursus-kursus, dan Seminar/Workshop/Magang/Sejenis).

Tabel 3.2.14. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Direktorat Perbenihan TW 2 tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Indeks Profesional ASN Lingkup Diektorat Perbenihan							
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
76,27	84,91	85	80	89,75	112,19	105,6	117,67	85	105,59

Capaian triwulan 2 tahun 2024 sebesar 89,75 % atau sebesar 112,19% dari target TW 2. Rencana aksi untuk triwulan berikutnya, diharapkan Direktorat Perbenihan menghimbau kepada seluruh PNS agar dapat lebih meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti seminar, pelatihan secara online maupun offline

### 3.2.5.1.2. IKSK.04.2 Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan

Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan merupakan indikator kinerja yang targetnya bersifat tahunan dan pencapaiannya dihitung di akhir tahun berdasarkan hasil penilaian Inspektorat Jenderal dan Sekretariat Jenderal KKP terhadap pemenuhan dokumen dan capaian kinerja Direktorat Perbenihan.

Tabel 3.2.15. Capaian Nilai PM SAKIP di Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Nilai Penilaian Mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (PM SAKIP) di Direktorat Perbenihan							
Realisasi		Target (%)		Realisasi	Capaian		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2024	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	64,05	82	-	-	-	-	-	-	-

indikator kinerja ini pengukurannya bersifat tahunan, maka hasil penilaian belum dapat disajikan. Namun rencana aksi untuk trwulan berikutnya adalah memaksimalkan sumberdaya yang ada untuk dapat memenuhi nilai PM SAKIP lingkup Dit. Perbenihan.

### 3.2.5.1.3. IKSK.04.3 Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Direktorat Perbenihan

Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya yang dokumen tindak lanjutnya dari Direktorat Perbenihan telah tuntas berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Direktorat Perbenihan berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat) yang terbit pada Tahun yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Direktorat perbenihan yang menjadi objek pengawasan.

Tabel 3.2.16. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Ditjen Perikanan Budidaya							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
100	100	80	80	100	125	125	100	85	105.88

Pada triwulan 2 tahun 2023 capaian hasil pengawasan inspektorat jenderal perikanan budidaya terhadap pelaksanaan kegiatan Direktorat Perbenihan sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2023, pencapaian target Direktorat Perbenihan menunjukkan hasil yang sama dengan pencapaian pada TW 2 tahun 2024 yaitu sebesar 100%. Rekomendasi atas rencana aksi TW 2 tahun 2024, Direktorat Perbenihan agar meningkatkan penyelesaian hasil pengawasan dengan mengupayakan semua kegiatan dalam administrasi kegiatan agar bisa dilengkapi dan tepat waktu serta akurat.

#### 3.2.5.1.4. IKSK.04.4 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Direktorat Perbenihan

Indikator Kinerja (IK) pada sasaran strategis ini adalah persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar. Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Penghitungan persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang standar, diperoleh dari persentase unit kerja level 2 yang mendistribusikan informasinya melalui *platform Portal Collaboration Office*.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan upaya dalam hal pengelolaan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung pencapaian IK dimaksud yaitu dengan menggunakan aplikasi Manajemen Pengetahuan, dengan tujuan setiap user (pegawai) memiliki akses untuk mendistribusikan dan menerima

informasi, sehingga diharapkan setiap individu di lingkup KKP memiliki pemahaman yang sama atas informasi yang dibagikan. Pengukuran dilaksanakan melalui penghitungan jumlah Unit Kerja lingkup KKP yang telah mengintegrasikan user manajemen pengetahuan dalam penggunaan aplikasi berbagi informasi dan data

Tabel 3.2.17. Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan Yang Terstandar TW 2 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
100	125,9	94	94	133,33	141,84	141,84	133,33%	-	-

Pada TW 2 tahun 2024 target manajemen pengetahuan yang terstandar pada Direktorat Perbenihan ditargetkan sebesar 94 dengan realisasi 133,33 (141,84%). Apabila dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya capaian menunjukkan ada kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan nilai yang salah satu penyebabnya adalah manajemen pengetahuan terstandar pada TW 2 tahun 2024 hanya diwajibkan bagi Eselon 2.

Rencana aksi atas hasil capaian di TW 2 tahun 2024, agar eselon 2 selalu mempersiapkan laporan yang dianggap perlu untuk dipublikasikan secara benar dengan memperhatikan kaidah transparan, efisien selalu tepat waktu dan tepat sasaran.

### **3.2.5.1.5. IKSK.04.5 Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan**

Indikator Kinerja ini merupakan ukuran atas tingkat keberhasilan/efektivitas dari pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP. Dalam hal ini, tingkat efektifitas merujuk pada suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) pelaksanaan kegiatan telah tercapai. Pada Tahun 2024, kegiatan prioritas/strategis yang dilakukan pengukuran (evaluasi) dibatasi pada kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan di satker direktorat perbenihan pada tahun 2024 dengan fokus pada pengukuran pemanfaatannya. Ukuran tingkat efektivitas mengacu kepada tiga buah Indikator yang meliputi:

1. Pencapaian tujuan (PT), diukur berdasarkan kesesuaian waktu dan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan berupa pemanfaatannya;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan adanya kegiatan sosialisasi atau pelatihan bagi penerima/objek kegiatan;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kesesuaian output kegiatan dengan kebutuhan objek kegiatan dan ketersediaan sarana/prasarana pendukung kegiatan.

Tabel 3.2.18. Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup Direktorat Perbenihan							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	93,46	80	-	-	-	-	-	-	-

Pada triwulan 2 tahun 2024, capaian belum tersedia karena pengukuran dilakukan pada akhir tahun. Namun demikian, untuk mempertahankan nilai efektivitas yang sudah dicapai pada tahun sebelumnya, Direktorat Perbenihan berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

### 3.2.5.1.6. IKSK.04.6. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA

Indikator Kinerja ini merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar didatabase KUSUKA dengan status submit, valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengupulkan/updating data pelaku usaha yang terlibat dikegiatan perbenihan. Target total pelaku usaha yang terdaftar di KUSUKA pada tahun 2024 sebanyak 4833 orang.

Tabel 3.2.19. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA TW 2 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang Terintegrasi KUSUKA							
Realisasi (%)		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
73	80	91	25	47,05	188,2	51,7	64,45	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA pada triwulan 2 tahun 2024 seperti tertera dalam tabel 3.2.5.6 realisasi mencapai 47,05 atau sekitar 188,2 persen dari target triwulan 2. Kondisi ini menunjukkan bahwa persentase pelaku usaha kelautan dan perikanan yang terintegrasi KUSUKA cukup besar dan sudah dikategorikan baik karena telah melebihi dari target, namun dalam pelaksanaan selanjutnya masih dapat dioptimalkan Kembali.

Rencana tindak lanjut di triwulan berikutnya agar pelaku usaha yang terlibat di kegiatan perbenihan didorong untuk mendaftar di aplikasi KUSUKA sehingga tercantum di database.

### 3.2.5.1.7. IKSK.04.7. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan

Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Dalam kegiatan ini akan dilakukan audit kearsipan yang merupakan proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan sendiri adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh

lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tabel 3.2.20. Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Nilai Pengawasan Kearsipan Unit Kearsipan Direktorat Perbenihan							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
-	-	75	-	-	-	-	-	-	-

Capaian indikator kegiatan nilai pengawasan kearsipan unit kearsipan Direktorat Perbenihan pada TW 2 tahun 2024 belum dapat diukur karena indikator ini bersifat tahunan serta tidak ada dalam rentra DJPB 2020- 2024 sehingga belum dapat dijadikan pembanding atas keberhasilan pada tahun sebelumnya. Namun demikian, agar target kegiatan ini tercapai di akhir tahun, Direktorat Perbenihan berupaya untuk memenuhi hal-hal yang menjadi tolok ukur dalam penilaiannya.

### 3.2.5.1.8. IKSK.04.8. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan

Persentase layanan perkantoran direktorat perbenihan adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena indikator kinerja ini merupakan ukuran atas pelaksanaan layanan perkantoran yang meliputi pelayanan jasa dan administrasi yang dilaksanakan di Direktorat Perbenihan.

Tabel 3.2.21. Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan TW 2 Tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Persentase Layanan Perkantoran Direktorat Perbenihan							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
100	75	80	80	100	125	125	100	-	-

Capaian indikator kegiatan persentase pelaksanaan layanan perkantoran TW 2 tahun 2024 seperti tertera dalam tabel 3.2.21, realisasi mencapai 100 atau sekitar 125 persen dari target 80 yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator ini merupakan hasil kerja Direktorat Perbenihan terutama terkait pelayanan perkantoran seperti pelayanan persuratan berdasarkan data yang masuk untuk permintaan nomor sebanyak 329 surat dengan semua permintaan nomor surat terlayani dan layanan rapat yang dilakukan secara offline dari total permintaan 25 kali semuanya telah tuntas dilakukan.

Rencana aksi atas capaian triwulan berikutnya adalah untuk meningkatkan pelayanan lebih baik agar tetap dijalankan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

### 3.2.5.1.9. IKSK.04.9 Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan

Persentase realisasi keuangan direktorat perbenihan adalah indikator kinerja kegiatan yang pencapaiannya perlu dilaksanakan karena Indikator kinerja ini merupakan ukuran atas realisasi penyerapan anggaran berdasarkan terhadap pagu anggaran Direktorat Perbenihan.

Tabel 3.2.22. Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan TW 2 tahun 2024

Sasaran Kegiatan		Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Pada Direktorat Perbenihan							
IKU		Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan							
Realisasi		Target (%)		Realisasi (%)	Capaian (%)		%perbandingan dengan	Rancangan Renstra DJPB 2020 – 2024	
TW 2	Tahun 2023	Tahunan	TW 2	TW 2	Thd realisasi TW 2 2024	Thd target tahun 2024	TW 2 2023	Target 2024	% capaian thd target akhir Renstra
21,59	99,98	90	40	7,52	18,8	8,35	34,83	-	-

Capaian indikator kegiatan Persentase Realisasi Keuangan Direktorat Perbenihan TW 2 tahun 2024, seperti terlihat dalam tabel dimana realisasi mencapai 7,52 persen dari target yang telah ditetapkan. Tidak tercapainya target TW 2 yaitu realisasi sebesar 40% disebabkan oleh sejumlah kegiatan yang masih belum selesai serta belum dapat dilaksanakan sehingga anggaran belum dapat diserap untuk direalisasikan.

Rencana aksi atas hasil capaian triwulan 2 pada tahun 2024, Direktorat Perbenihan akan mempercepat pelaksanaan realisasi kegiatan sehingga target pada TW 3 dapat tercapai.

## **BAB 4**

### **PENUTUP**

#### **4.1. KESIMPULAN**

1. Laporan Kinerja (LKJ) Direktorat Perbenihan triwulan 2 tahun 2024 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala terhadap capaian strategis Direktorat Perbenihan pada triwulan 2 tahun 2024.
2. Terhadap capaian kinerja, selanjutnya dilakukan analisis dan evaluasi serta perbandingan terhadap capaian triwulan 2 tahun sebelumnya sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan
3. Secara umum, Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Direktorat Perbenihan yang diperjanjikan pada triwulan 2 tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan nilai kinerja organisasi (NKO) sangat baik dengan nilai 110,95 namun ada indikator kinerja keuangan yang dibawah target.

#### **4.2. REKOMENDASI**

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja triwulan 2 Direktorat Perbenihan tahun 2024 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Perlu mempertahankan target – target indikator kinerja Utama (IKU) yang sudah tercapai dengan melakukan monitoring dan pendokumentasian yang baik sehingga konsistensi pencapaian target kinerja dapat dipertahankan.
2. Direktorat Perbenihan akan memantau dan berkoordinasi dengan bagian Program DJPB kemungkinan penyesuaian target apabila terjadi perubahan anggaran, hal ini untuk menghindari terjadi revisi perjanjian kinerja.
3. Melakukan percepatan pembinaan terhadap unit pembenihan yang sudah mengusulkan untuk dilakukan sertifikasi CPIB.
4. Merekap hasil pembinaan unit pembenihan yang siap sertifikasi untuk ditindak lanjuti penilaian sertifikasi CPIB

5. Direktorat Perbenihan akan memperbaiki dalam perencanaan kedepan agar dapat mengajukan pembayaran dari kegiatan bantuan masyarakat dilakukan secara Lumpsum (LS) dan diusahakan pengajuan jangan sampai diakhir bulan teriwulan berikutnya.